



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN

# 2023



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



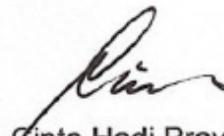
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
INSPEKTORAT V, INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 12 Februari 2024  
Inspektur V,



Cipto Hadi Prayitno  
NIP. 196507241990031004



**Tornanda Syaifullah**  
Inspektur Jenderal

## Kata Pengantar

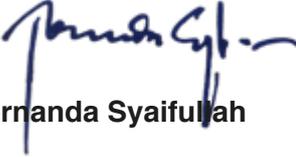
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2023 merupakan pemenuhan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal KKP dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern KKP selama Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Itjen tahun 2023 masuk dalam kriteria istimewa, hal ini ditunjukkan dari skor kinerja Itjen pada Triwulan IV yang mencapai 111,35% sedangkan kumulatif sampai dengan Triwulan IV adalah 111,26%. Nilai tersebut menggambarkan kondisi umum atas pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan sebagai hasil (*outcome*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen tahun 2023. Beberapa hasil penting yang dapat dicapai Itjen dan berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola KKP diantaranya: 1) terjaganya nilai temuan materialitas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di bawah 1%; 2) meningkatnya tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern KKP; 3) meningkatnya jumlah unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); 4) meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja KKP, dan 5) terjaganya Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP. Selain memberikan kontribusi perbaikan terhadap kinerja Kementerian, pelaksanaan program dan kegiatan Itjen tahun 2023 juga menghasilkan berbagai perbaikan internal yang meliputi perbaikan kapabilitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan tingkat maturitas pengendalian internal Itjen. Penjelasan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja Itjen tahun 2023 akan disajikan pada bagian pembahasan dalam laporan ini.

Secara umum, kinerja pengawasan intern KKP yang dilaksanakan oleh Itjen memang cukup memuaskan. Namun demikian, Itjen akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya agar hal-hal yang masih kurang atau belum optimal dapat ditingkatkan. Melalui manajemen kinerja yang sistematis dan terstruktur, evaluasi kinerja Itjen dilaksanakan secara terukur dan berkala guna memastikan pelaksanaan pengawasan intern itjen berada di jalur yang benar dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Langkah perbaikan pengawasan intern ke depan salah satunya dilaksanakan dengan meningkatkan peran dan mutu Itjen dalam hal penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan pemberian advis (*Advisory Services*) pada pelaksanaan program dan kegiatan mitra kerja.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh *stakeholders* atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan kinerja ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”. Untuk itu, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas kami. Masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern yang menjadi mandat kami. Akhir kata, Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 31 Januari 2024  
Inspektur Jenderal KKP



Tormanda Syaifulah

## **Ikhtisar Eksekutif**

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Itjen menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Itjen berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku. Tidak hanya itu, Itjen juga menerapkan praktik-praktik terbaik yang berkembang seiring dengan pembelajaran dari hasil evaluasi internal maupun dari organisasi lain (eksternal). Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada, Itjen harus memfokuskan pengawasan pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, pengawasan intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menghadapi keterbatasan dan tantangan tersebut. Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan intern, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan KKP.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kinerja dan Anggaran Itjen tahun 2023 adalah Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan intern. Keberhasilan Program ini diukur melalui pencapaian 2 Sasaran Program dengan 19 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen revisi Perjanjian Kinerja pada bulan November Tahun 2023. Dalam hal ini, jumlah indikator kinerja Itjen pada dokumen Perjanjian Kinerja awal berjumlah 20 indikator. Perlu disampaikan bahwa pengurangan jumlah indikator kinerja pada revisi dokumen Perjanjian Kinerja ditujukan dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/

RC.610/XI/2023, Tanggal 1 November 2023, Tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial yang berisi arahan untuk penghapusan IKU Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada dokumen perjanjian kinerja seluruh unit kerja. Penghapusan IKU tersebut dilakukan karena komponen-komponen pembentuk RB telah ditetapkan sebagai indikator kinerja pada Revisi *Roadmap* Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 sehingga untuk menghindari pengulangan maka PMPRB ditiadakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, seluruh Indikator Kinerja tersebut dapat melampaui target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi pengelolaan kinerja mencapai 111,26 (kategori Istimewa). Beberapa capaian kinerja Itjen KKP yang cukup menggembirakan dalam mendukung kinerja KKP tahun 2021 antara lain: 1) Temuan materialitas oleh pengawas eksternal sebesar 0,12% dari total realisasi anggaran KKP; 2) Tingkat Kapasitas Itjen mencapai Level 3 (*delivered*) dengan nilai 3,61; 3) Nilai Evaluasi atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP mendapat nilai 3,56; 4) Unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bertambah menjadi 97 Unit kerja; 4) Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja KKP mendapat predikat 83,18(A); dan 5) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP mencapai 91,52%. Pencapaian yang baik tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pengendalian atas perkembangan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan secara periodik.

Pencapaian kinerja program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp75.393.908.501,00 atau 99,64% dari alokasi anggaran setelah *Automatic Adjustment* sebesar Rp75.666.386.000,00. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dengan *input* anggaran tersebut (99,64%) dapat dihasilkan capaian *output* program/kegiatan sebesar 100% dan capaian kinerja yang melebihi target (skor kinerja: 111,35%). Dengan demikian, efisiensi anggaran dalam menghasilkan *output* program/kegiatan sebesar 0,36% dan efisiensi anggaran yang dihasilkan dalam mencapai target kinerja sebesar 11,22%. Efisiensi anggaran ini dapat dicapai oleh Itjen sebagai hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas. Selain itu, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis resiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran. Pencapaian kinerja program Itjen juga didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 236 orang yang sebagian besar (> 90%) berpendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Diploma IV/S-1, S-2, dan S-3.

Pencapaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai kegiatan pengawasan dan berbagai upaya peningkatan kualitas pengawasan intern yang difokuskan kepada pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, kegiatan strategis dan bantuan pemerintah, pembangunan budaya integritas, penerapan program anti korupsi, tindak lanjut rekomendasi atas temuan Itjen dan BPK, sistem pengendalian internal, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kinerja Itjen juga terwujud dari adanya upaya serius organisasi dalam meningkatkan kapabilitas Itjen melalui perbaikan manajemen pengawasan, penguatan manajemen SDM, dan optimalisasi

pemanfaatan sistem informasi. Ke depan, kualitas pengawasan intern KKP juga akan diperkuat dengan menggalang sinergi dan koordinasi secara lebih aktif dengan APIP Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah dalam rangka mengawal pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan nasional.





## Daftar Isi

Kata Pengantar _____	iii
Ikhtisar Eksekutif _____	v
Daftar Isi _____	ix
Daftar Tabel _____	x
Daftar Gambar _____	xiii

<b>BAB I</b>	A. Latar Belakang _____	2
<b>Pendahuluan</b>	B. Dasar Hukum _____	3
	C. Tugas, Fungsi dan Peran _____	4
	D. Struktur Organisasi _____	5
	E. Maksud dan Tujuan _____	7
	F. Ruang Lingkup _____	7
	G. Metodologi _____	7
	H. Sistematika Laporan _____	7

<b>BAB II</b>	A. Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP	
<b>Perencanaan</b>	Tahun 2020 - 2024 _____	10
<b>dan Perjanjian</b>	B. Kebijakan Pengawasan _____	13
<b>Kinerja</b>	C. Rencana Kinerja Tahunan _____	14
	D. Program dan Kegiatan Pengawasan _____	15

<b>BAB III</b>	A. Pengelolaan Kinerja Pengelolaan Kinerja	
<b>Akuntabilitas</b>	Inspektorat Jenderal _____	20
<b>Kinerja</b>	B. Capaian Kinerja _____	21
	C. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran _____	51

<b>BAB IV</b>	A. Kesimpulan _____	60
<b>Penutup</b>	B. Permasalahan _____	61
	C. Rencana Perbaikan _____	62

## Lampiran

## Daftar Tabel

Tabel 1. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal KKP TA 2023	14
Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja	21
Tabel 3. Capaian Kinerja Kinerja Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023	22
Tabel 4. Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal (BPK RI) pada KKP	25
Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	25
Tabel 6. Perbandingan Capaian Level Kapabilitas Itjen Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	28
Tabel 7. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	29
Tabel 8. Unit Kerja yang Meraih Predikat Menuju WBK lingkup KKP Tahun 2023	30
Tabel 9. Perbandingan Capaian Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	31
Tabel 10. Target dan Realisasi Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK lingkup KKP Tahun 2018 - 2023	31
Tabel 11. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	32
Tabel 12. Perbandingan Capaian Nilai Integritas KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	33
Tabel 13. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	34
Tabel 14. Perbandingan Nilai Indeks IP ASN Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2023	34

Tabel 15. Perbandingan Capaian Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	35
Tabel 16. Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2023 _____	36
Tabel 17. Perbandingan Capaian Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	36
Tabel 18. Perbandingan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	37
Tabel 19. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	39
Tabel 20. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas Strategis (Bantuan Pemerintah) Lingkup KKP Tahun 2022 _____	41
Tabel 21. Perbandingan Capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	41
Tabel 22. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	43
Tabel 23. Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023 _____	44
Tabel 24. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	44
Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	45

Tabel 26. Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Pada Level 2 (Inspektorat) Tahun 2023 _____	46
Tabel 27. Perbandingan Capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	47
Tabel 28. Perbandingan Capaian Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	47
Tabel 29. Realisasi Kepatuhan Pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023 _____	48
Tabel 30. Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan _____	48
Tabel 31. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	49
Tabel 32. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Inspektorat Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 _____	49
Tabel 33. Perbandingan Capaian Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024 _____	50
Tabel 34. Target dan Realisasi Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Itjen Tahun 2019 - 2023 _____	50
Tabel 35. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Unit Kerja Lingkup Itjen Tahun 2023 Berdasarkan Aplikasi OMSPAN _____	51
Tabel 36. Pagu dan Realisasi Anggaran Itjen KKP TA 2015-2023 _____	52
Tabel 37. Realisasi <i>Output</i> Kegiatan Itjen KKP Tahun 2023 _____	52
Tabel 38. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Program Itjen KKP Tahun 2023 _____	53
Tabel 39. Efisiensi Anggaran Itjen KKP Tahun 2023 per Jenis Capaian Kinerja _____	56

## Daftar Gambar

Gambar 1. Tugas, Fungsi dan Peran Itjen	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP	6
Gambar 3. Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP	13
Gambar 4. Arah Kebijakan, Fokus Kebijakan dan Strategi Pengawasan Itjen Tahun 2023	14
Gambar 5. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Itjen Tahun 2023	22
Gambar 6. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM	27
Gambar 7. Grafik Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023	38



**BAB I  
PENDAHULUAN**



- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tugas, Fungsi dan Peran
- D. Struktur Organisasi
- E. Maksud dan Tujuan
- F. Ruang Lingkup
- G. Metodologi
- H. Sistematika Laporan

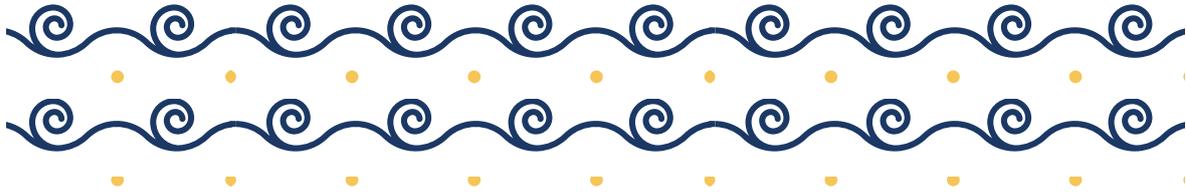


# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong melalui Membangun Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia yang diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan tingkat reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan Negara.

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.



Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal-hal tersebut penting karena bermuara pada pencapaian cita-cita pembangunan nasional untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2020-2024, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

## B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengacu pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 7/PERMEN-KP/2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

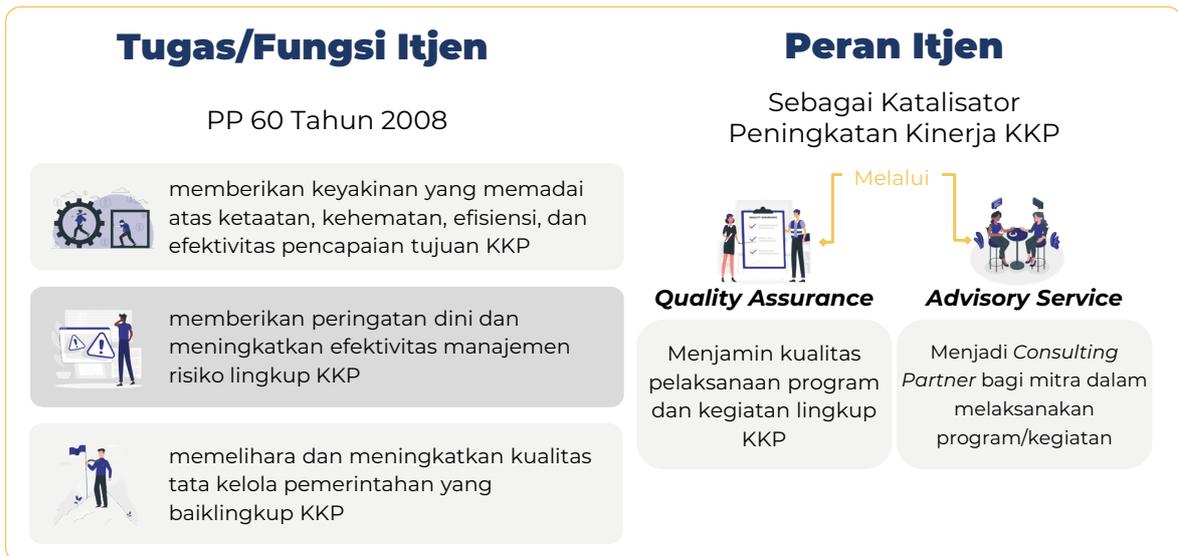
### **C. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/

PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern lingkup KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun bila mengacu kepada PP 60 Tahun 2008 dan Kebijakan Pengawasan Tahun 2023, Tugas, Fungsi dan Peran Itjen secara umum disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Tugas, Fungsi dan Peran Itjen

## D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020, struktur Organisasi Itjen KKP terdiri atas enam unit kerja Eselon II, yaitu:

### 1. Sekretariat Itjen KKP

Sekretariat Itjen KKP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Itjen KKP.

### 2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), serta seluruh UPT lingkup BPPSDMKP.

### 3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), serta seluruh UPT lingkup DJPT dan DJPSDKP.

### 4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan

Kelautan dan Ruang Laut (DJPkRL), serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB dan DJPKRL.

5. Inspektorat IV

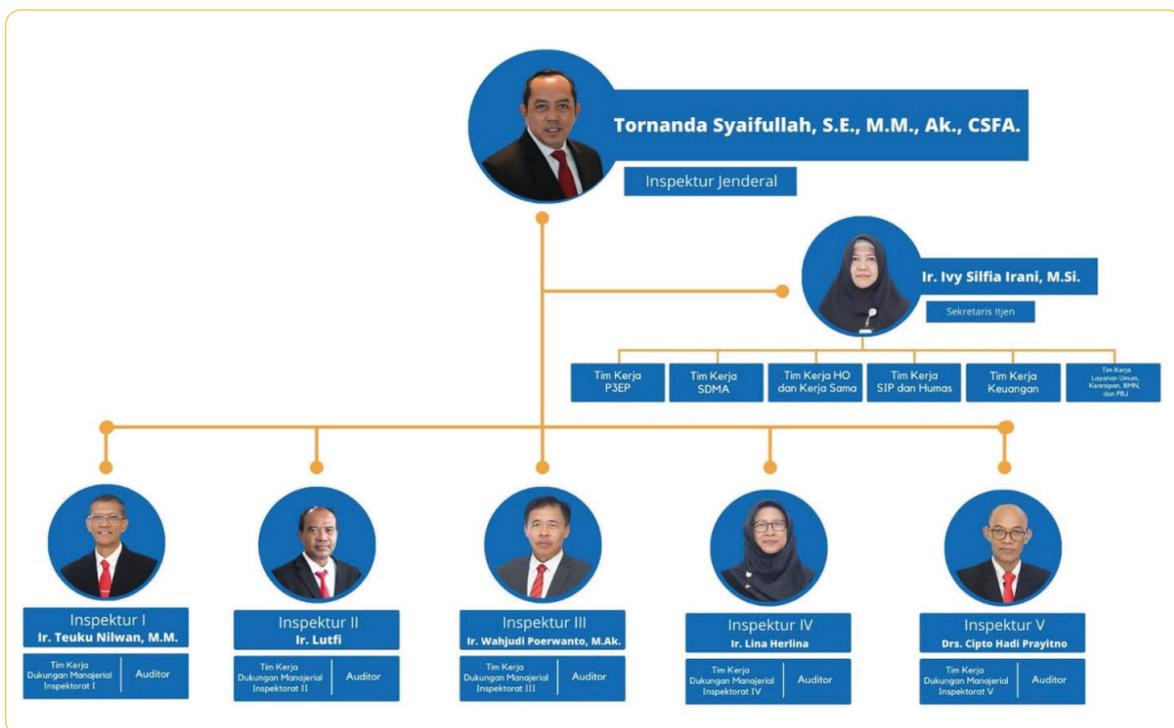
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta seluruh UPT lingkup Ditjen PDSPKP dan

BPPMHKP.

6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Itjen, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan KKP.

Struktur organisasi Itjen KKP disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP

## E. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi dan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal periode tahun 2023. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja tahun 2023 untuk kemudian merumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja.

## F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kinerja mencakup pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan dimandatkan oleh Menteri Kelautan dan perikanan kepada Inspektur Jenderal dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, laporan kinerja meliputi akuntabilitas sumber daya yang digunakan dalam proses pencapaian kinerja.

## G. METODOLOGI

Laporan kinerja disusun dengan metode:

- a. Pengukuran dan analisis capaian kinerja organisasi
  - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
  - 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 5 tahun terakhir (Jika data

tersedia atau bukan IKU Baru)

- 3) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun pelaporan (2023) dengan Target Tahun Akhir Renstra (2024)
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan capaian kinerja dapat berupa kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan serta permasalahan yang dihadapi atau perlu diatasi untuk optimalisasi pencapaian kinerja kedepan

- b. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran

- 1) Realisasi anggaran kegiatan
- 2) Realisasi anggaran per Sasaran Kinerja
- 3) Analisis kualitas penggunaan anggaran (Efisiensi)

## H. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan meliputi latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra KKP dan Itjen KKP, Rencana Kinerja, dan Perjanjian Kinerja; 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan penjabaran atas pencapaian kinerja dan efisiensi pengelolaan sumber daya tahun; dan 4) Penutup yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan rencana perbaikan kinerja.





## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**



- A. Rencana Strategis Itjen KKP dan Itjen KKP 2020 – 2024*
- B. Kebijakan Pengawasan*
- C. Rencana Kinerja Tahunan*
- D. Program dan Kegiatan Pengawasan*



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari Renstra KKP menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra 2020– 2024 dan turunannya pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

#### 1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:



“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Dengan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi :

“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

## 2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:



- 
1. Memberikan Pengawasan Intern Terbaik Untuk Peningkatan Kinerja KKP;
  2. Mendorong Pengendalian Intern Yang Efektif Terhadap Sistem dan Tata kelola KKP;
  3. Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP Yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

### 3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan organisasi disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

- 
1. Terwujudnya Kinerja KKP yang Efektif dan Efisien;
  2. Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola KKP yang Baik;
  3. Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan KKP.

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Program.

### 4. Sasaran Program Itjen KKP

Sebagai unit pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mendukung

pencapaian Visi dan Misi KKP melalui Sasaran Program (SP) “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP”

Selanjutnya, sasaran tersebut diuraikan ke level di bawahnya diselaraskan pada level 2 yaitu Inspektorat I sampai dengan V dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

## B. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Itjen KKP disusun untuk memberikan arah, fokus dan pilihan prioritas program dan kegiatan KKP yang akan diawasi pada Tahun 2023. Dengan adanya kebijakan pengawasan ini, pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen diharapkan menjadi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghasilkan

pengawasan intern yang efektif dan efisien dalam mengawal program/kegiatan KKP, khususnya yang menjadi prioritas pimpinan Kementerian. Dalam prosesnya, Kebijakan Pengawasan Itjen KKP disusun dengan dasar seperti disajikan dalam Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP

Dasar kebijakan pengawasan secara umum meliputi hal-hal yang menjadi rujukan dasar bagi pelaksanaan pengawasan intern oleh Itjen di lingkungan KKP dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pelaksanaan program/

kegiatan serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan berlandaskan kepada dasar kebijakan tersebut, ditetapkanlah Kebijakan Pengawasan yang meliputi Arah Kebijakan, Fokus Kebijakan dan Strategi Pengawasan Itjen Tahun 2023 dengan gambaran sebagaimana Gambar berikut.





Gambar 4. Arah Kebijakan, Fokus Kebijakan dan Strategi Pengawasan Itjen Tahun 2023

## C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada tahun 2023, Itjen KKP melaksanakan 2 (dua) kegiatan utama dengan alokasi anggaran setelah *Automatic Adjustment* (Oktober 2023) yang mencapai Rp75.666.386.000,00. Kedua kegiatan tersebut adalah:

1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran senilai Rp30.251.583.000,00 dengan rincian *output* sebanyak 12 dokumen.

2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran senilai Rp45.414.803.000,00.

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal KKP TA 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	≤ 1%
		2 Level Kapabilitas Itjen KKP (Level)	3,1
		3 Level Maturitas SPIP KKP (Level)	3,1
		4 Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	90

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	5 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP	A (80,5)
		6 Nilai Integritas KKP (Nilai)	76
		7 Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) lingkup Itjen	83
		8 Persentase Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Itjen	92%
		9 Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	85%
		10 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP	93,75
		11 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP	86
		12 Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup KKP	81%
		13 Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP	81%
		14 Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP	81%
		15 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen	75%
		16 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18
		17 Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen	88%
		18 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP	80%
		19 Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,15

Penetapan kinerja Inspektorat Jenderal TA 2023 dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tersaji dalam Lampiran 1.

#### **D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN**

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai unsur pengawasan intern lingkup KKP, Itjen KKP melaksanakan program “Dukungan Manajemen” dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP;
2. Dukungan Manajemen Internal

Lingkup Inspektorat Jenderal.

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, antara lain :

1. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);
2. Reviu Laporan Keuangan (LK) KKP dan Mitra Itjen KKP;
3. Reviu SAKIP/Laporan Kinerja (LKj) KKP dan Mitra Itjen KKP;
4. Pemantauan Tindak Lanjut;
5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;



6. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
7. Evaluasi unit Kerja berstatus WBK/WBBM
8. Reviu Perencanaan Program/ Kegiatan Mitra Itjen KKP;
9. Reviu Penganggaran Mitra Kerja Itjen KKP
10. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja;
11. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;
12. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
13. Pendampingan Program Pembangunan KP;
14. Pemantauan Program Strategis bidang KP;
15. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP.







**BAB III  
AKUNTABILITAS  
KINERJA**



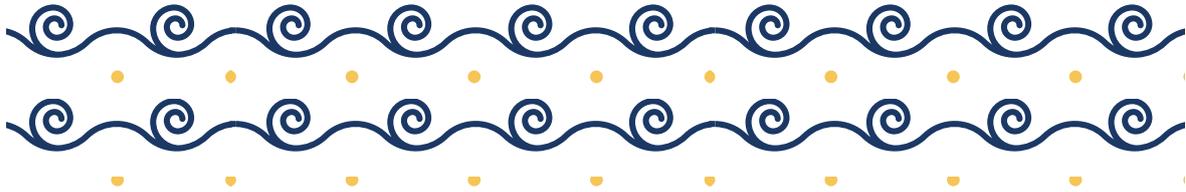
- A. .Pengelolaan Kinerja Inspektorat Jenderal
- B. Capaian Kinerja
- C. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran



## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL**

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Itjen KKP membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing unit kerja lingkup Itjen untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja berdasarkan warna Biru/Istimewa (110-120), Hijau/Baik (90 - <110), Kuning/Cukup (70 - <90), Merah/Kurang (50 - <70), Hitam/Sangat Kurang (<50), abu-abu (belum ada penilaian) yang disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja**

No	Warna	Keterangan
1.	Istimewa	Nilai 110 - 120
2.	Baik	Nilai 90 - <110
3.	Cukup	Nilai 70 - <90
4.	Kurang	Nilai 50 - <70
5.	Sangat Kurang	Nilai <50
6.	Belum <i>input</i> capaian	

Berdasarkan standar penilaian yang disajikan pada tabel 2 di atas diketahui bahwa untuk mencapai kinerja yang baik maka capaian masing-masing indikator kinerja maupun capaian kinerja secara keseluruhan, minimal harus mencapai nilai setidaknya 90. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja yang optimal, Itjen melakukan pengendalian secara berkala melalui monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

## B. CAPAIAN KINERJA

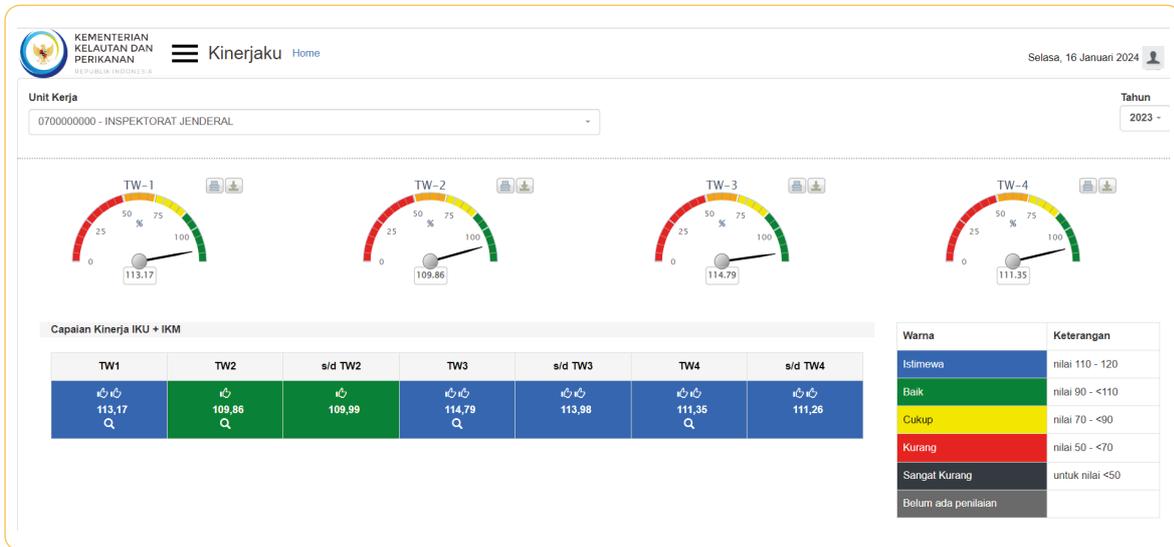
Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Itjen berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan Sistem Informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah

dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran program/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.



Kondisi capaian kinerja Itjen Tahun 2023 berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi

pengelolaan kinerja dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 5. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Itjen Tahun 2023

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata capaian kinerja Itjen pada Triwulan IV mencapai angka >110 atau berpredikat "Istimewa". Hal ini menunjukkan upaya pencapaian target kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh aparatur Itjen sampai dengan Triwulan IV telah optimal. Capaian kinerja IKU Inspektorat Jenderal Triwulan IV

mencapai 111,35, sedangkan capaian kinerja IKU dan IK Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan IV mencapai 111, 26. Rekapitulasi capaian kinerja Itjen sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Capaian Kinerja Kinerja Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Real	% Capaian	Nilai di Aplikasi
1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	≤ 1%	0,12%	199,88%	120%
		2 Level Kapabilitas Itjen KKP (Level)	3,1	3,61	116,45%	116,45%
		3 Level Maturitas SPIP KKP (Level)	3,1	3,56	114,84%	114,84%
		4 Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	90	97	107,78%	107,78%
		5 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP	A (80,5)	A (83,18)	103,33%	103,33%
		6 Nilai Integritas KKP (Nilai)	76	80,32	105,68%	105,68%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Real	% Capaian	Nilai di Aplikasi
7		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) lingkup Itjen	83	90,61	109,17%	109,17%
8		Persentase Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Itjen	92%	108,01%	117,40%	117,40%
9		Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	85%	100%	117,65%	117,65%
10		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP	93,75	95,22	101,57%	101,57%
11		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP	86	90,41	105,13%	105,13%
12		Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup KKP	81%	89,31%	110,26%	110,26%
13		Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP	81%	92,83%	114,60%	114,60%
14		Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP	81%	90,97%	112,31%	112,31%
15		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen	75%	91,52%	122,03%	120%
16		Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18	26	144,44%	120%
17		Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen	88%	95,99%	109,08%	109,08%
18		Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP	80%	97,25%	121,56%	120%



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Real	% Capaian	Nilai di Aplikasi
19		Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,15	4,29	103,37%	103,37%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Itjen pada Tahun 2023 cukup memuaskan dimana seluruh target indikator kinerja Itjen dapat tercapai melampaui target yang ditetapkan. Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP

(*kinerjaku.kkp.go.id*) ditetapkan 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Secara lebih rinci, uraian capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja program Itjen Tahun 2023 disampaikan sebagai berikut.



### Sasaran Program

#### Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP

Sasaran program ini ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan KKP secara terukur dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan fungsinya, Itjen menjadikan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP sebagai Sasaran Program pertama dalam

mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Itjen dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di lingkungan KKP diukur dan dipertanggungjawabkan melalui capaian 19 Indikator Kinerja sebagaimana berikut.

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas

### IKU - 1

#### Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP

pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2022. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi

pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan yaitu pada Triwulan III. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja

Itjen Tahun 2023, Nilai temuan materialitas LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP adalah sebesar Rp6.661.024.959,00 dari realisasi anggaran KKP sebesar Rp5.397.787.396.056,00. Dengan demikian, capaian IKU ini mencapai 0,12% atau 188% dari target <1%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka capaian tahun 2022 menunjukkan capaian yang lebih baik yaitu sebesar

0,01%. Hal ini karena terjadinya peningkatan nilai temuan materialitas pada Tahun 2023 seiring dengan bertambahnya jumlah kegiatan dan anggaran yang dikelola oleh unit kerja lingkup KKP. Perkembangan capaian nilai temuan materialitas pengawas eksternal pada KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal (BPK RI) pada KKP**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Temuan LHP BPK									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	0,090%	0,1506%	0,4409%	3,64%	0,80%	0,04%	0,18%	0,07%	0,01%	0,12%

Sumber : Hasil Pengolahan atas Hasil Pengawasan BPK RI terhadap LK KKP

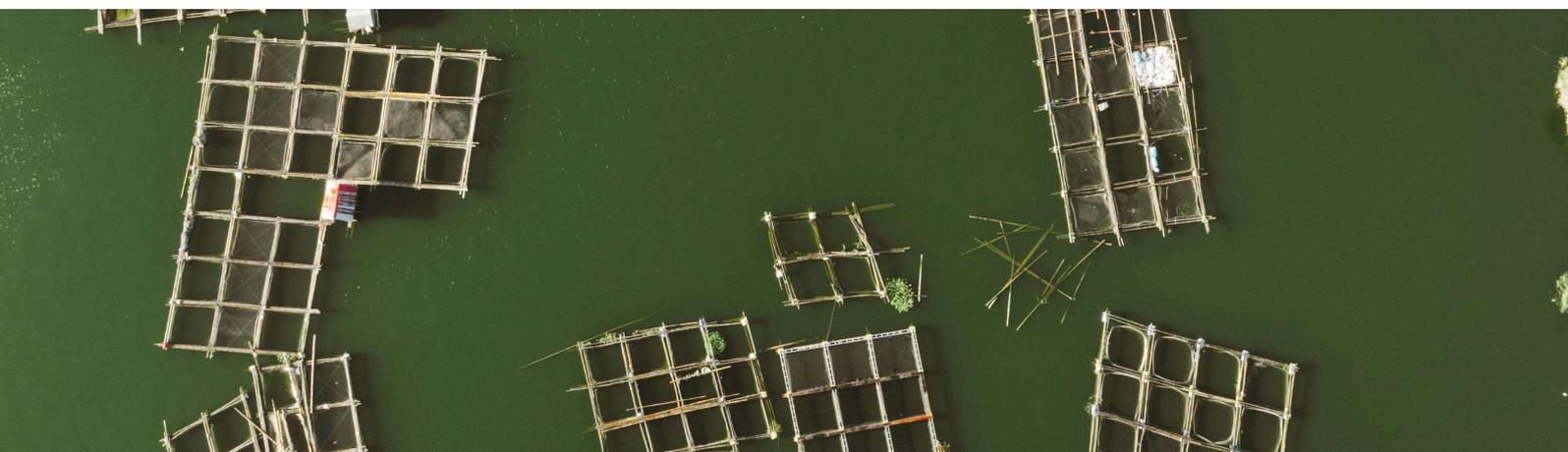
Dalam rencana jangka menengah 2020-2024, target IKU ini ditetapkan sebesar <1% setiap tahun. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka kondisi capaian akan sama dengan kondisi tahun ini.

Upaya yang dilakukan oleh Itjen dalam

pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), pengelolaan BMN, pengelolaan keuangan, penerapan SPIP, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, dan Reviu Laporan Keuangan lingkup KKP

**Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP	<1%	0,01%	199%	<1%	0,12%	199%	<1%	0,12%	199%





## IKU - 2

### Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (IACM)

*Internal Audit Capability Model* (IACM) adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Research Foundation* (IIARF) untuk memperkuat atau meningkatkan audit intern melalui langkah evolusi kecil yang terdiri dari 5 (lima) level kapabilitas progresif, yaitu: (1) *initial*; (2) *structured*; (3) *delivered*; (4) *institutionalized*; dan (5) *optimized*. Bila dilihat dari fungsi dan manfaatnya, IACM merupakan:

1. Sarana komunikasi (*communication vehicles*): dasar untuk mengkomunikasikan apa yang disebut sebagai audit intern yang efektif dan bagaimana audit intern melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan untuk menunjukkan pentingnya audit intern bagi pengambil keputusan.
2. Kerangka penilaian (*framework for assessment*): kerangka untuk menilai kemampuan unit audit intern dalam memenuhi standar profesional dan praktik audit intern, baik melalui penilaian sendiri atau penilaian

eksternal.

3. Peta jalan perbaikan secara terarah (*road map for orderly improvement*): peta jalan untuk membangun kemampuan dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan audit intern.

Dengan kata lain, IACM merupakan rerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif dimana setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Dalam pelaksanaannya, penilaian tingkat kapabilitas APIP dengan metode IACM dilakukan oleh BPKP, namun demikian dalam hal BPKP tidak melakukan penilaian maka APIP dapat melakukan penilaian secara mandiri. BPKP melakukan penilaian terhadap tingkat kapabilitas Itjen KKP tahun 2023. Sedangkan karakteristik kapasitas APIP dapat disampaikan sebagai berikut:



Gambar 6. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PE.09.03/LHP-264 / D102/1/2023 Tanggal 6 Desember 2023 berada pada Level 3 (*Delivered*) dengan nilai 3,61. Dengan demikian, target tingkat kapabilitas Itjen Tahun 2023 tercapai 116,45% dari target nilai 3,1. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai kapabilitas Itjen tahun 2023 telah mencapai 103,14% dari target nilai 3,5 pada tahun 2024. Secara level, capaian tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan Itjen dapat mempertahankan tingkat kapabilitasnya pada Level 3 atau

*Delivered* yang menunjukkan bahwa Itjen telah melaksanakan aktifitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan Itjen sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini, peningkatan efektifitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola. Dalam Laporan Kinerja BPKP Tahun 2022 disampaikan bahwa terdapat 623 K/L/ Pemda mitra BPKP terdapat 341 K/L/ Pemda yang mencapai tingkat kapabilitas APIP level 3 atau 54,74%. Secara nilai, hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Itjen KKP tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan nilai tahun



sebelumnya. Beberapa upaya utama yang dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan Itjen diantaranya dengan perbaikan manajemen SDM, perbaikan manajemen pengawasan, perbaikan pengelolaan kinerja dan memperkuat peran Itjen dalam hal pemberian layanan konsultasi

Selain itu, upaya yang akan dilakukan ke depan adalah perbaikan pada area pengelolaan SDM dan kualitas layanan konsultasi bagi mitra/stakeholders Itjen. Perbandingan capaian tahun lalu dan target jangka menengah (2024) disampaikan pada tabel berikut.

**Tabel 6. Perbandingan Capaian Level Kapabilitas Itjen Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Kapabilitas Itjen KKP	3	3,55	118,33	3,1	3,61	116,45	3,5	3,61	103,14

### IKU - 3

#### Nilai Evaluasi Atas Maturitas Implementasi SPIP KKP

Nilai Evaluasi Atas Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pada Tahun 2023, Itjen KKP menargetkan tingkat maturitas implementasi SPI KKP dapat mencapai nilai 3,1. Dalam prosesnya, pengukuran tingkat maturitas SPI KKP mengacu kepada hasil penilaian BPKP. Namun bilamana BPKP tidak melakukan penilaian atau belum mengeluarkan hasil penilaian saat penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKj), maka tingkat

maturitas ditentukan berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen KKP.

Pada akhir Tahun 2023, BPKP telah melakukan penilaian terhadap Tingkat Maturitas SPIP KKP, Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan telah disepakati namun hasil penilaian secara resmi belum disampaikan kepada KKP hingga saat penyusunan LKJ Tahunan. Oleh karena itu, tingkat maturitas SPIP KKP Tahun 2023 mengacu kepada hasil penilaian mandiri sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi dimana capaian nilai sebesar 3,56 atau berada pada Level 3 (terdefinisi). Level ini secara umum menggambarkan:

- Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, dan
- Strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta

pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Dengan demikian, capaian kinerja Itjen dalam mendorong tingkat maturitas SPIP KKP tercapai pada nilai evaluasi 3,56 atau 114,84% dari target nilai 3,1.

Kemudian bila dibandingkan dengan target capaian level Maturitas SPIP KKP jangka menengah, capaian Tahun 2023 sama dengan target level yang ditetapkan pada Level 3 di Tahun 2024.

**Tabel 7. Perbandingan Capaian Level Maturitas SPIP KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai Evaluasi Maturitas SPIP KKP	3	3,81	127%	3,1	3,56	114,84%	3	3,56	118,7

Pencapaian Maturitas penyelenggaraan SPIP KKP 2023 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, namun dapat menunjukkan bahwa mengimplementasikan SPI KKP cukup baik dan hal ini tidak terlepas dari peran Itjen KKP yang terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas SPI di lingkungan KKP. Upaya yang dilakukan oleh Itjen untuk mendorong kualitas SPI KKP diantaranya melalui kegiatan Sosialisasi dan konsultasi tentang SPIP, asistensi atau pendampingan dalam penyusunan manajemen risiko (MR), evaluasi manajemen risiko, dan penilaian mandiri maturitas SPI Unit Eselon I dan KKP.

Kegiatan pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SPI KKP akan terus dilanjutkan khususnya untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil penilaian mandiri. Hasil penilaian mandiri menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam aktivitas evaluasi dan pendokumentasian kegiatan.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "Terdefinisi" adalah perlu melakukan Evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian dan pemantauan yang terintegrasi atas kebijakan strategis dan operasional.

## IKU - 4

### Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK

Dalam rangka mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola di lingkungan KKP, Itjen menerapkan pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu indikator kinerjanya. Dalam prosesnya, pembangunan dan penilaian Zona Integritas mengacu kepada Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 kemudian dirubah menjadi Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, suatu unit kerja dinilai telah menuju WBK/



WBBM jika memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang menunjukkan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran unit kerja untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam pelaksanaannya, penilaian dilakukan oleh Itjen sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang bertugas untuk menguji apakah unit kerja yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon I lingkup KKP telah berhasil membangun Zona Integritas menuju WBK untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, unit-unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dapat diusulkan untuk dievaluasi dan ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBBM kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN).

Pada tahun 2023, Itjen menargetkan unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK di lingkungan KKP sebanyak 90 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai target tersebut, beberapa upaya telah dilaksanakan oleh Itjen selama tahun 2023, seperti menyusun petunjuk teknis pengawasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK, melaksanakan

sosialisasi pedoman pembangunan Zona Integritas, melaksanakan asistensi, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada unit kerja lingkup KKP, khususnya pada unit kerja yang diusulkan oleh unit eselon I atau mitra kerja. Tidak hanya itu, dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas sebagaimana yang diamanatkan dalam PermenPAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019, telah dikembangkan inovasi dalam mendorong percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KKP yang mempermudah pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian secara online melalui aplikasi e-Zona Integritas.

Berdasarkan hasil penilaian internal yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 189 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2023 oleh Tim Penilai Internal KKP, diketahui bahwa pada tahun 2023 unit kerja yang ditetapkan sebanyak 14 unit kerja. Unit kerja yang dinilai memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 8. Unit Kerja yang Meraih Predikat Menuju WBK lingkup KKP Tahun 2023**

No	Eselon I	Unit Kerja
1	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan
2	DJPT	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
3	DJPB	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
4	DJPB	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
5	DJPDSPKP	Direktorat Pemasaran
6	DJPSDKP	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon
7	DJPSDKP	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
8	BPPSDMKP	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
9	BPPSDMKP	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandarani
10	BPPSDMKP	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

No	Eselon I	Unit Kerja
11	BP2MHKP	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung
12	BP2MHKP	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang
13	BP2MHKP	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II
14	BP2MHKP	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

Dengan bertambahnya unit berpredikat menuju WBK sebanyak 14 unit kerja tersebut, maka secara kumulatif jumlah unit kerja berpredikat WBK sampai dengan tahun 2023 sebanyak 97 unit kerja atau 107,78% dari target 90 unit kerja. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK pada tahun 2022 berjumlah

lebih banyak. Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 telah mencapai 89,81% atau 97 dari target 108 unit kerja yang ditetapkan pada tahun 2024. Secara lebih rinci, unit kerja lingkup KKP yang telah meraih predikat menuju WBK/WBBM hingga tahun 2023 disampaikan pada lampiran.

**Tabel 9. Perbandingan Capaian Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK	72	83	113,88%	90	97	107,78%	108	97	89,81%

Dapat disampaikan bahwa KKP memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungannya. Pembangunan Zona Integritas dilakukan baik di unit kerja pusat maupun Unit Pelayanan Teknis (UPT) di daerah, khususnya unit kerja yang memiliki fungsi layanan bagi masyarakat. Program pembangunan

Zona Integritas terus dikembangkan sejak tahun 2012 guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Perkembangan capaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 10. Target dan Realisasi Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK lingkup KKP Tahun 2018 - 2023**

Indikator Kinerja	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (kumulatif)	12	22	37	35	42	48	56	64	72	83	90	97



Kedepan, program pembangunan Zona Integritas menuju WBK akan terus dilanjutkan. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Itjen untuk mendorong pembangunan Zona Integritas lingkup KKP secara

berkelanjutan belum mencapai hasil optimal. Diperlukan penguatan koordinasi antar Inspektorat lingkup Itjen serta mitra kerja dalam merancang dan melaksanakan program pengawasan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di unit eselon I lingkup KKP.

## **IKU - 5**

### **Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP**

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP adalah nilai yang mencerminkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di lingkup KKP pada periode evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kualitas lima komponen sistem akuntabilitas kinerja yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja KKP secara berkelanjutan, Itjen menetapkan nilai SAKIP sebagai salah satu Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen. Seiring dengan adanya perkembangan dalam kebijakan pedoman penilaian

implementasi SAKIP yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB, pada Tahun 2023, Itjen menetapkan target nilai SAKIP KKP 80,5 atau kategori A (memuaskan).

Berdasarkan hasil penilaian mandiri, nilai implementasi SAKIP KKP Tahun 2023 sebesar 83,18 atau 103,33% dari target 80,5. Capaian ini melampaui capaian dari tahun sebelumnya sebesar 80,88 (predikat A) yang juga diperoleh dari hasil penilaian mandiri oleh Itjen KKP. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 85 (A) pada tahun 2024, maka capaian tahun 2023 telah mencapai 97,85%.

**Tabel 11. Perbandingan Capaian Nilai SAKIP KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai PMSAKIP KKP	80,01	80,88	101,09	80,50	83,18	103,33	85	83,18	97,85

Adapun upaya yang dilakukan Itjen KKP untuk mencapai target IKU ini pada tahun 2023 antara lain, Reviu Laporan Kinerja Tahun 2022 pada sembilan Unit Kerja Eselon I, Workshop Evaluasi atas Implementasi SAKIP bagi Tim Evaluator Implementasi SAKIP KKP dan mitra kerja, asistensi penguatan SAKIP pada unit kerja pusat dan UPT, dan Evaluasi

atas Implementasi SAKIP pada sembilan Unit Kerja Eselon I lingkup KKP.

Selanjutnya, untuk terus meningkatkan kualitas SAKIP KKP, Itjen akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan berfokus untuk melakukan perbaikan pada kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penilaian mandiri

maupun hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.

## IKU - 6

### Nilai Integritas KKP

Nilai Integritas KKP merupakan nilai yang diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tahunan. Survei ini ditujukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang sesuai karakteristik instansi masing-masing. Pada Tahun 2023, Nilai Integritas KKP ditargetkan sebesar 76 dan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV.

Pada saat dilakukan penyusunan

laporan ini, KPK telah melaksanakan survei penilaian integritas tahun 2023, namun belum menyampaikan hasil penilaian secara resmi kepada KKP. Sehingga sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja Itjen Tahun 2023, dalam hal belum terdapat hasil survei penilaian integritas dari KPK maka capaian IKU Nilai Integritas KKP mengacu kepada hasil penilaian tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2022, Nilai Integritas KKP mencapai nilai 80,32 atau 105,68% dari target Tahun 2023 sebesar 76. Nilai tersebut dapat dinilai cukup baik karena berada di atas nilai Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD secara nasional yang berada pada angka 71,94.

**Tabel 12. Perbandingan Capaian Nilai Integritas KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai Integritas KKP	75	80,32	107,09	76	80,32	105,68	80,5	76	94,41

Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka mendorong pencapaian target nilai integritas KKP diantaranya pengawasan terhadap pembangunan Zona Integritas, Pengendalian Gratifikasi, Sosialisasi dan

*Sharing Session* Pembangunan Budaya Integritas kepada seluruh unit kerja dan masyarakat yang menjadi Stakholders KKP, Evaluasi LHKASN, dan Persiapan Survei Penilaian Integritas.

## IKU - 7

### Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,

kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor. 38 Tahun 2018). Pada Tahun 2023, target nilai



Indeks Profesionalitas ASN KKP sebesar 83 dan akan dilakukan penilaian secara semesteran oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP dengan rincian target nilai 83 pada Semester I dan Semester II.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP Nomor B.88/SJ.3/TU.140/I/2024 Tanggal 11 Januari 2024 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2022. Nilai Indeks Profesionalitas

ASN Itjen KKP pada periode Semester II Tahun 2022 mencapai 90,61 atau 109,17% dari target 83. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Itjen pada tahun 2023 lebih tinggi dari capaian tahun 2022 yang mencapai 85,36. Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian tahun 2023 telah mencapai 112,31% dari target 76 pada tahun 2024.

**Tabel 13. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Indeks Profesionalitas ASN Itjen KKP	78	85,36	108,97	83	90,61	109,17	76	90,61	119,22

Capaian tersebut merupakan indeks capaian tertinggi jika dibandingkan dengan unit eselon I lainnya lingkup KKP bahkan dibandingkan dengan

capaian Indeks Profesional ASN level KKP sebesar 81,22. Perbandingan nilai IP ASN unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 14. Perbandingan Nilai Indeks IP ASN Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
1	Sekretariat Jenderal	21.49	33.41	24.84	5	84.75
2	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	21.26	38.56	25.13	5	89.95
3	Ditjen Perikanan Tangkap	20.95	37.06	24.96	5	87.97
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	20.99	37.29	25.08	5	88.37
5	Ditjen PDS	21.91	38.65	24.94	5	90.5
6	Ditjen PSDKP	21.18	36.21	25.1	5	87.5
7	Inspektorat Jenderal	21.18	39.32	25.1	5	90.61
8	BPPSDMKP	20.79	36.02	24.44	4.87	86.12
9	BPPMHKP	20.73	37.35	24.94	4.98	88

Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian target IKU ini diantaranya adalah dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar kepada Pegawai, kegiatan Pelatihan dan Pendidikan khususnya bagi pejabat fungsional baru hasil transformasi jabatan, studi banding dengan instansi lain, monitoring dan evaluasi presensi pegawai, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan kedepan dengan memperbaiki beberapa

hal yang masih menjadi kekurangan dalam hal profesionalitas ASN Itjen KKP diantaranya dalam hal pemenuhan standar minimal pelatihan pegawai sebanyak 20 Jam Pelatihan per Tahun dan pemenuhan standar kompetensi pegawai pada jabatan fungsional. Terkait hal tersebut, Itjen akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai pada tahun selanjutnya.

## IKU - 8

### Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Capaian IKU ini diukur Triwulanan dan perhitungannya didasarkan pada penggunaan aplikasi *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Target yang ditetapkan untuk IK ini pada tahun 2023 adalah sebesar 92% yang diukur secara Triwulanan dengan target sama sebesar 92%.

Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, nilai capaian IK ini mencapai 108,01% atau 117,40% dari target 92%. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata dari capaian Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023. Dengan demikian, capaian IK ini dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target IK ini adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi penggunaan *Portal Collaboration Office* (Cofis) dan melakukan pemantauan atas perkembangan keaktifan penggunaan Cofis lingkup Itjen.

**Tabel 15. Perbandingan Capaian Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan lingkup Itjen	86%	97,58%	113,47	92%	108,01	117,40%	94%	108,01%	114,90%



Sebagaimana IKU ini diterapkan diseluruh unit eselon I maka capaian kinerja Itjen dalam penerapan manajemen pengetahuan tahun 2023 dapat dibandingkan dengan unit Eselon I

lainnya. Capaian penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 16. Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Triwulan				Capaian	Target	% Capaian
		I	II	III	IV			
1	SETJEN	98,93	99,34	118,75	133,33	112,59	92,00	122,38
2	DJPKRL	97,44	98,52	126,67	130,00	113,16	92,00	123,00
3	DJPT	100,00	100,00	126,67	133,33	115,00	92,00	125,00
4	DJPB	100,00	100,00	133,33	130,00	115,83	92,00	125,90
5	DJPDSPKP	100,00	100,00	133,33	130,00	115,83	92,00	125,90
6	DJPSDKP	98,37	95,67	126,67	126,67	111,85	92,00	121,57
7	ITJEN	100,00	95,93	113,89	122,22	108,01	92,00	117,40
8	BPPSDMKP	99,53	100,00	133,33	133,33	116,55	92,00	126,68
9	BPPMHKP	91,92	100,00	112,50	125,00	107,36	92,00	116,69

## IKU - 9

### Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP

IKU ini merupakan sebuah ukuran dari implementasi penggunaan sistem teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan oleh unit kerja lingkup Itjen KKP. Penggunaan sistem informasi pengawasan tersebut diukur dari rata-rata jumlah persentase implementasi aplikasi dukungan pengawasan yang terdiri dari Aplikasi SIMWAS dan Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) dengan target 85%.

Berdasarkan hasil pengukuran, persentase implementasi sistem informasi pengawasan lingkup Itjen KKP Tahun 2023 mencapai 117,65%. Jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 sedikit lebih rendah dari capaian tahun 2022 dengan capaian 125,93%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kelemahan pengendalian dalam hal memastikan kesesuaian data yang diinput ke dalam aplikasi SIMWAS/SIDAK dengan jumlah surat tugas yang diterbitkan. Terkait hal ini, Itjen akan melakukan perbaikan dalam hal tata kelola pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan melalui aplikasi SIDAK. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2024 ini telah mencapai 113,63% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 88%.

**Tabel 17. Perbandingan Capaian Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	84%	105,78%	125,93	85%	100%	117,65	88%	100%	113,63%

Berikutnya Itjen akan mendorong pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan manajemen pengawasan intern. Terkait hal ini, upaya yang akan dilakukan oleh Itjen ke depan adalah melakukan pengembangan aplikasi AMS menjadi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) yang diharapkan

dapat dioperasikan lebih mudah (*user friendly*) dan menjawab perkembangan kebutuhan pengawasan intern saat ini. Selain itu, Itjen akan melakukan pengendalian implementasi tindak lanjut hasil pengawasan melalui aplikasi SIDAK dengan cara menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK secara berkala.

## IKU - 10

### Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Pada Tahun 2023, nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Itjen KKP ditargetkan sebesar 93,75 dan diukur capaiannya secara semesteran.

Berdasarkan hasil pengukuran, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) Itjen sampai dengan Semester II Tahun 2023 mencapai 95,22% atau 101,57% dari target yang telah ditetapkan sebesar 93,75. Jika dibandingkan dengan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya deviasi antara realisasi dengan rencana penarikan dana yang terdapat pada halaman III DIPA. Adapun jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 105,80% dari target nilai yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 90. Secara lebih rinci, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 18. Perbandingan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen	89	95,98	107,84	93,75	95,22	101,57	90	95,22	105,80



## IKU - 11

### Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah daerah. NKA merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Nilai diperoleh berdasarkan data *input* dan *output* yang dimasukkan oleh satuan kerja ke dalam aplikasi

SMART Kemenkeu. Data Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diunduh dari aplikasi SMART DJA Kemenkeu sebagai dasar capaian kinerja anggaran Itjen KKP yang akan diukur pada Triwulan IV Tahun 2023 dengan target 86.

Berdasarkan data Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diunduh dari aplikasi SMART DJA Kemenkeu pada awal Januari Tahun 2023, diketahui bahwa Nilai Kinerja Anggaran Itjen Tahun 2023 mencapai 90,41 atau sebesar 105,13% dari target 86.



Sumber: Aplikasi SMART DJA Kemenkeu

Gambar 7. Grafik Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian mengalami penurunan 2,19 poin dari capaian tahun 2022 yang mencapai 90,41. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya nilai efisiensi anggaran Itjen dari 93,9 pada

tahun 2022 menjadi 50,9 pada tahun 2023. Sedangkan bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 telah mencapai 101,58% dari target yang ditetapkan sebesar 89 pada tahun 2024.

**Tabel 19. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen	86	92,60	107,67	86	90,41	105,13	89	90,41	101,58%

Untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang telah ditetapkan, Itjen secara periodik (bulanan dan triwulanan) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja seluruh level lingkup Itjen.

Pengawasan intern yang handal merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sebuah manajemen organisasi, pengawasan intern memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Beberapa fungsi utama pengawas intern dalam organisasi antara lain:

1. Mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan tujuan.
2. Mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*).
3. Melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran peraturan dan norma.
4. Mendorong implementasi kebijakan pemerintah/nasional sesuai dengan sasaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen, diperlukan suatu ukuran-ukuran yang dapat menggambarkan kualitas dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan kepada mitra kerja dan

kementerian. Karenaitu, Itjen menetapkan “Pengawasan Intern KKP yang Handal sebagai sasaran kinerja kedua sebagai ukuran kualitas pengawasan yang diukur melalui pencapaian delapan Indikator Kinerja, yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup KKP
2. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP
3. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP
4. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen
5. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP
6. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen
7. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP
8. Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen

Gambaran pencapaian sasaran “Pengawasan Intern KKP yang Handal” berdasarkan capaian masing-masing IKU disampaikan sebagai berikut.



## IKU - 12

### Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup KKP

Indikator kinerja ini ditujukan untuk menjaga kualitas pengawasan dan mendorong tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, kegiatan prioritas/strategis yang menjadi fokus pengukuran adalah kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya (T-1) oleh unit eselon I lingkup KKP. Secara garis besar, pengukuran IKU ini dilakukan dengan menggunakan parameter penilaian kualitas kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh unit eselon I dan kualitas pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Itjen. Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 81% yang diukur secara tahunan pada Triwulan IV.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJURL), dan BRSDMKP yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Evaluasi dilaksanakan secara Uji petik dengan melibatkan penyuluh perikanan pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu 1) Jawa Barat; 2) Jawa Timur; 3) Kalimantan Timur; 4) Sulawesi Selatan; 5) Kepulauan Bangka Belitung; 6) Nusa Tenggara

Barat; dan 7) Nusa Tenggara Timur. Jumlah kelompok penerima bantuan yang dilakukan evaluasi sebanyak 260 kelompok penerima bantuan dan 263 peserta pelatihan. Parameter penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Hasil evaluasi atas tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah pada lima unit eselon I KKP di tujuh provinsi disajikan pada lampiran.

Selanjutnya, hasil penilaian tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah tersebut dikombinasikan dengan nilai kualitas pengawasan Itjen atas kegiatan pengadaan barang/jasa pada unit eselon I lingkup KKP. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai efektivitas pengawasan kegiatan bantuan pemerintah lingkup KKP disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 20. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas Strategis (Bantuan Pemerintah) Lingkup KKP Tahun 2022**

Unit Kerja Eselon I	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah	Efektivitas Pengawasan PBJ	Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Bantuan Pemerintah	Nilai Akhir (Capaian Tahun 2023)
BPPSDMKP	90,71	87,69	89,50	89,31
DJPT	90,39	86,52	88,84	
DJPB	80,91	83,20	81,82	
DJPKRL	94,29	93,70	94,05	
DJPDSPKP	95,32	87,84	92,32	

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat efektivitas pengawasan ltjen terhadap kegiatan prioritas/strategis (Bantuan Pemerintah) yang dilaksanakan oleh unit eselon I pada Tahun 2022 mencapai nilai 89,31 atau 110,26% dari target 81%. Upaya utama yang dilakukan ltjen untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan pendampingan dan pemantauan dalam proses pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup KKP.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian tahun 2023 mengalami penurunan 1,08 poin

yang dipengaruhi oleh menurunnya tingkat pemanfaatan bantuan dan tingkat keberhasilan kelompok dalam mengembangkan bantuan yang diterima. Berdasarkan uji petik yang dilakukan masih terdapat sejumlah kelompok yang belum memanfaatkan bantuan, belum dapat mengembangkan usaha dengan bantuan yang diterima dan belum sepenuhnya memahami kewajiban melaporkan pemanfaatan bantuan. Adapun bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 108,91% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 82.

**Tabel 21. Perbandingan Capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP	80	90,39	112,99	81	89,31	110,26	82	89,31	108,91

Terhadap permasalahan yang ditemukan dari hasil evaluasi, ltjen telah melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi perbaikan

terhadap masing-masing mitra untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai dengan tujuan penyaluran.



## IKU - 13

### Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, tingkat Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai 81% dan diukur secara tahunan pada Triwulan IV. Pengukuran dilaksanakan melalui

kegiatan evaluasi dengan indikator/ variabel, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP.

Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa tingkat efektifitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup KKP yang merupakan nilai rata-rata dari seluruh Inspektorat lingkup Itjen pada Tahun 2023 mencapai 92,83%. Dengan demikian Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2023 mencapai 112,31% dari target 81%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kualitas program pengawasan Tahunan Itjen dalam hal pengelolaan BMN pada mitra kerja, pengawasan berjenjang melalui kendali mutu pengawasan, dan hasil (*outcome*) pengawasan yang ditunjukkan melalui tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I. Adapun upaya yang dilakukan Itjen untuk mencapai target IKU ini adalah dengan melakukan pendampingan dan reviu atas pengelolaan BMN unit eselon I lingkup KKP.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,50 poin yang dipengaruhi oleh menurunnya nilai kepatuhan pengelolaan BMN pada beberapa unit eselon I khususnya pada aspek ketertiban administrasi pengelolaan BMN. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian Tahun 2023 telah mencapai 113,21% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 82

**Tabel 22. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP	80	95,33	119,16	81	92,83	114,60	82	92,83	113,21

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, diantaranya:

1. Menetapkan kegiatan pendampingan (*consulting*) atas pengelolaan BMN pada Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) Itjen KKP;

2. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
3. Mendorong penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP.

## IKU - 14

### Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengawasan PBJ yang efektif, pada tahun 2023, Itjen menetapkan indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dengan target 81 sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan

memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV melalui kegiatan evaluasi dengan indikator/ variabel, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan PBJ Unit Eselon I lingkup KKP.

Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa tingkat efektifitas pengawasan PBJ lingkup KKP yang merupakan nilai rata-rata dari seluruh Inspektorat lingkup Itjen pada Tahun 2023 mencapai 90,97. Dengan demikian Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2023 mencapai 112,31% atau diatas target yang ditetapkan. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi kualitas program pengawasan Tahunan Itjen terhadap pelaksanaan PBJ pada mitra



kerja, pengawasan berjenjang melalui kendali mutu pengawasan, dan hasil (*outcome*) pengawasan yang ditunjukkan melalui tingkat kepatuhan PBJ unit Eselon I.

**Tabel 23. Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Unit Eselon I Mitra	Nilai (%)					
			Indikator 1 <sup>1)</sup>	Indikator 2 <sup>2)</sup>	Indikator 3 <sup>3)</sup>	Total	IKU Level 2	IKU Level 1
1	Inspektorat I	Setjen	16,70	40,00	35,32	92,02	91,27	90,97
		BPPSDMKP	17,00	40,00	33,82	90,52		
2	Inspektorat II	DJPT	16,70	30,00	37,36	84,06	88,89	
		DJPSPDKP	18,35	40,00	35,36	93,71		
3	Inspektorat III	DJPB	20,00	36,70	32,50	89,22	87,88	
		DJPKRL	16,70	40,00	29,84	86,54		
4	Inspektorat IV	DJPDSPKP	20,00	40,00	29,50	89,50	87,33	
		BPPMHKP	20,00	40,00	25,16	85,16		
5	Inspektorat V	Itjen	20,00	40,00	39,50	99,50	99,50	

Keterangan:

- 1) = Kualitas Perencanaan Pengawasan
- 2) = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
- 3) = Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Eselon I

Hasil evaluasi yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengawasan PBJ yang dilaksanakan oleh masing-masing Inspektorat dapat melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 81%. Jika dibandingkan dengan tahun

lalu capaian IKU ini pada tahun 2023 mengalami peningkatan 2,96 poin. Namun bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian Tahun 2023 mencapai 110,94% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 82%.

**Tabel 24. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP	80%	88,01%	110,01	81%	90,97%	114,60	82%	92,83%	116,03

Terkait pencapaian tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan ke depan, diantaranya: 1) memperkuat penilaian risiko PBJ dari masing-masing unit eselon I; 2) memperkuat kegiatan pendampingan

(*consulting*) atas pelaksanaan PBJ; 3) mendorong tindak lanjut hasil pengawasan PBJ; dan 4) mendorong kepatuhan pelaksanaan PBJ pada Unit Eselon I lingkup KKP sesuai peraturan yang berlaku.

## IKU - 15

### Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP yang ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan dengan target 75% pada tahun 2023. Dari hasil pengukuran kinerja, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh mitra kerja Itjen sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 91,52% atau 122,03% dari target 75%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka capaian tersebut mengalami penurunan 0,59 poin. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah penyelesaian tindak lanjut pada unit eselon I. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat disampaikan bahwa capaian tahun 2023 mencapai 114,4% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 80%.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Inspektorat lingkup Itjen terhadap mitra kerjanya. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Itjen dilakukan melalui penerapan aplikasi Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK) yang memungkinkan mitra kerja untuk menindaklanjuti hasil pengawasan secara daring. Tidak hanya itu, komitmen dan keseriusan dari unit kerja untuk segera menyelesaikan saran yang diberikan oleh Itjen akan sangat menentukan capaian kinerja IKU ini.

Perkembangan jumlah hasil pengawasan Itjen yang dimanfaatkan oleh mitra kerja dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 25. Perbandingan Capaian Kinerja Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra	70%	92,11%	131,59	75%	91,52%	122,03	80%	91,52%	114,40

Pengawasan secara berkelanjutan perlu dilakukan oleh setiap Inspektorat untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen. Hal ini penting untuk dilakukan karena capaian tindak lanjut hasil pengawasan level

Itjen merupakan akumulasi dari kinerja penyelesaian tindak lanjut pada mitra kerja dari masing-masing Inspektorat (level 2). Capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen oleh masing-masing mitra disampaikan pada tabel berikut:



**Tabel 26. Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Pada Level 2 (Inspektorat) Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	(%) Sisa Rekomendasi
1	Setjen	113	112	99,12%	1	0,88%
2	BPPSDMKP	393	339	86,26%	54	13,74%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	368	301	81,79%	67	18,21%
4	Ditjen PSDKP	140	140	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	575	549	95,48%	26	4,52%
6	Ditjen PKRL	541	525	97,04%	16	2,96%
7	Ditjen PDSPKP	132	123	93,18%	9	6,82%
8	BPPMHKP	390	342	87,69%	48	12,31%
9	Itjen	120	106	88,33%	14	11,67%
<b>TOTAL</b>		<b>2772</b>	<b>2537</b>	<b>91,52%</b>	<b>235</b>	<b>8.48%</b>

## IKU - 16

### Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP kepada seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengawasan tahun 2022, yaitu selain sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*), Itjen perlu menitikberatkan perannya sebagai konsultan (*Advisory Services*) yang akan memberikan jasa konsultasi serta saran perbaikan dalam proses pelaksanaan program/kegiatan juga pada tataran kebijakan.

Pada tahun 2023, Itjen KKP menargetkan untuk melakukan pengawasan atau kajian terhadap minimal 18 kebijakan/peraturan/prosedur operasi lingkup KKP. Dalam hal ini, pengawasan berupa kajian tersebut ditujukan untuk

mendorong penyempurnaan dan penguatan implementasi kebijakan/peraturan/prosedur terkait tata kelola pelaksanaan program/kegiatan pada mitra kerja. Berdasarkan pemantauan kinerja tahun 2023, terdapat 26 kajian yang dilaksanakan oleh Itjen untuk mendorong perbaikan implementasi kebijakan/peraturan/prosedur pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja. Dengan demikian, rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2023 dapat terealisasi lebih baik sebanyak 26 dari target 18 kajian atau 144,44% dari target. Capaian ini lebih banyak 3 (tiga) rekomendasi dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa target IKU ini ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*). Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun lalu dan target jangka menengah disampaikan pada tabel berikut:

**Tabel 27. Perbandingan Capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP	18	23	127,78	18	26	144,44	18	26	144,44

## IKU - 17

### Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan adalah jumlah penugasan dan pelaporan hasil audit juga evaluasi yang dilaksanakan oleh Itjen KKP terhadap mitra kerja yang memenuhi standar mutu pengawasan berdasarkan tingkat kepatuhan penyampaian dan kualitas formulir Kendali Mutu Pengawasan (KMP). Pada tahun 2023, kegiatan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan secara optimal ditargetkan minimal 88% dari seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan.

dilaksanakan oleh Inspektorat V, realisasi capaian IKU ini pada Tahun 2023 sebesar 95,99% atau 109,08% dari target 88%. Angka capaian tersebut sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 98,98%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kualitas pengukuran di mana pada tahun sebelumnya nilai kualitas kendali mutu belum sepenuhnya menjadi ukuran penilaian. Sedangkan bila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 111,21% dari target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 89%.

Berdasarkan hasil evaluasi yang

**Tabel 28. Perbandingan Capaian Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP	87%	98,98%	113,77%	88%	95,99%	109,08%	89%	95,99%	107,85

Selanjutnya, disampaikan bahwa capaian tersebut merupakan nilai total dari pelaksanaan kegiatan pengawasan

Audit, Reviu, dan Evaluasi seluruh Inspektorat lingkup Itjen dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 29. Realisasi Kepatuhan Pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2023**

Unit Kerja	Semester I (%)	Semester II (%)	Rata-rata (%)
Inspektorat I	95,95	96,91	96,42
Inspektorat II	97,87	94,06	95,97
Inspektorat III	87,82	98,18	93,00
Inspektorat IV	95,91	94,12	95,02
Inspektorat V	99,13	100	99,57
<b>Total</b>	<b>95,33</b>	<b>96,65</b>	<b>95,99</b>

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, seluruh Inspektorat dapat mencapai dan melampaui target IKU ini. Meskipun demikian, Itjen KKP akan terus melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu pengawasan, diantaranya melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur pengawasan Itjen dalam mengimplementasikan pengendalian

secara berjenjang. Lebih lanjut, Itjen juga akan terus melakukan evaluasi atas implementasi Kendali Mutu Pengawasan secara periodik di bawah koordinasi Inspektorat V untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap sesuai dengan standar mutu pengawasan. Perkembangan pelaksanaan penugasan dan pelaporan yang memenuhi standar mutu pengawasan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 30. Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan**

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan	80,77%	92,31%	90,85%	92,14%	98,09%	96,78%	98,98%	95,99%

## IKU - 18

### Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP

Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKP) adalah persentase kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan dengan PKPT yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT ditargetkan sebesar 80% dari seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat V, diketahui bahwa

tingkat kepatuhan terhadap PKPT tahun 2023 sebesar 97,25% atau 121,56% dari target 80%. Capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 98,61%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian dengan arah kebijakan pimpinan dalam hal fokus pengawasan pada periode Semester II. Sedangkan bila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 kondisinya akan

sama dengan capaian tahun 2023 yaitu 121,56%. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini adalah

kegiatan pemantauan atas kepatuhan PKPT pada Inspektorat lingkup Itjen yang dilakukan secara periodik.

**Tabel 31. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP	80%	98,61%	123,26%	80%	97,25%	121,56%	80%	97,25%	121,56%

Rincian tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT Tahun 2023 dari masing-masing Inspektorat adalah sebagai berikut.

**Tabel 32. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Inspektorat Lingkup Itjen KKP Tahun 2023**

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	100	98,18	99,09
2	Inspektorat II	97,5	98,94	98,22
3	Inspektorat III	96,72	98,08	97,40
4	Inspektorat IV	100	98,26	99,13
5	Inspektorat V	90,79	97,14	93,97
	<b>Rata-rata</b>	<b>96,32</b>	<b>98,17</b>	<b>97,25</b>

## IKU - 19

### Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen

Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen KKP adalah suatu penilaian/persepsi pegawai lingkup KKP terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Itjen pada suatu unit kerja yang menjadi objek pengawasan. Indeks persepsi pegawai KKP diperoleh dari kegiatan survei dengan perangkat kuesioner yang berisi parameter untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai KKP terhadap pelaksanaan pengawasan Itjen KKP.

Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa pada tahun 2023 tingkat kepuasan pegawai KKP terhadap

kinerja pengawasan Itjen mencapai 4,29 atau 103,37% dari target 4,15 yang termasuk ke dalam kategori Sangat Puas pada perhitungan Skala Likert (1-5). Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tingkat kepuasan pegawai berada pada posisi nilai 4,36. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi pegawai terhadap kinerja pengawasan Itjen, diantaranya terkait dengan aspek teknis/prosedur pengawasan, kompetensi dan perilaku auditor, serta kecepatan dalam merespon usulan tindak lanjut hasil pengawasan dari mitra. Adapun bila



dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2023 mencapai 102,14% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 4,2.

**Tabel 33. Perbandingan Capaian Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP Tahun 2023 dengan Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	T	R	%	T	R	%	T	Real 2023	%
Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen	4,10	4,36	106,34	4,15	4,29	103,37	4,20	4,29	102,14

Perlu disampaikan bahwa jumlah UPT/Satker dan responden tahun 2023 mencapai 443 responden pada 31 UPT/Satker. Terkait hal ini, Itjen akan mendorong peningkatan ruang lingkup Survei di tahun yang akan datang dengan

memanfaatkan sistem informasi.

Perkembangan capaian tingkat kepuasan pegawai KKP dari tahun ke tahun disampaikan pada tabel berikut.

**Tabel 34. Target dan Realisasi Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Itjen Tahun 2019 - 2023**

Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Indeks persepsi pegawai KKP terhadap kinerja Itjen	4,0	4,29	4,0	4,22	4,05	4,36	4,10	4,36	4,15	4,29

Menindaklanjuti masukan dan saran dari responden survei tahun 2023, maka Itjen KKP perlu meningkatkan perannya sebagai *Consulting Partner* melalui berbagai kegiatan pengawasan yang menghasilkan saran perbaikan pada saat pelaksanaan program/kegiatan (*Advisory Services*) seperti pengawalan, pendampingan dan asistensi. Selain itu penekanan pada pengawalan dari awal pada kegiatan strategis melalui *probity audit* cukup efektif dalam membantu mitra Itjen KKP. Beberapa hal yang

harus menjadi fokus Itjen didalam upaya peningkatan nilai indeks persepsi pegawai KKP antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan dan profesionalitas yang dilaksanakan oleh Itjen KKP dengan lebih mendorong kegiatan *Advisory Services*.
- b. Melakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan standar dan kode etik yang berlaku.

## C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

### 1. Realisasi Anggaran Kegiatan Unit Kerja

Pada Tahun 2023, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp75.393.908.501,00 atau 99,64% dari alokasi anggaran setelah *Automatic Adjustment* sebesar Rp75.666.386.000,00. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai

cukup efisien karena dengan *input* anggaran tersebut (99,64%) dapat dihasilkan capaian *output* program/kegiatan sebesar 100%. Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan enam kegiatan utama yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Itjen dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 35. Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Unit Kerja Lingkup Itjen Tahun 2023 Berdasarkan Aplikasi OMSPAN**

NO	UNIT KERJA/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1	<b>Inspektorat I</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP	4.817.252.000	4.816.843.900	99,99
2	<b>Inspektorat II</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	4.967.100.000	4.967.051.602	99,99
3	<b>Inspektorat III</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP	5.020.495.000	5.020.443.455	99,99
4	<b>Inspektorat IV</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP	4.684.709.000	4.684.654.255	99,99
5	<b>Inspektorat V</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V	4.450.229.000	4.450.029.973	99,99
6	<b>Sekretariat Itjen</b> Dukungan Manajemen Internal Itjen KKP	51.726.601.000	51.454.885.316	99,47
<b>TOTAL</b>		<b>75.666.386.000</b>	<b>75.393.908.501</b>	<b>99,64</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran kegiatan dari seluruh unit kerja lingkup Itjen cukup optimal dengan tingkat realisasi masing-masing unit di atas 99% sehingga secara keseluruhan realisasi anggaran Itjen mencapai 99,64%. Adapun sisa anggaran sebesar 0,36% atau Rp272.477.499,00 berasal dari sisa belanja pegawai berupa sisa tunjangan kinerja dan uang makan

yang tidak dibayarkan karena tingkat kehadiran pegawai, sisa belanja modal, sisa belanja barang dan sisa kegiatan karena terjadi penghematan dalam pelaksanaan.

Bila dibandingkan dengan tingkat realisasi anggaran sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2023 sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,81%. Hal ini dipengaruhi



oleh sisa belanja pegawai yang lebih besar pada tahun 2023 yang terdiri dari sisa belanja Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai, yang disebabkan mutasi pegawai dan perhitungan hadir hari kerja

atas pengurangan hari penugasan. Sebagai perbandingan, kondisi realisasi anggaran Itjen dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 36. Pagu dan Realisasi Anggaran Itjen KKP TA 2015-2023**

Tahun	Pagu	Realisasi	
		Nilai	%
2015	75.156.000.000,00	74.442.423.836,00	99,05
2016	67.037.176.000,00	65.688.456.302,00	97,99
2017	66.602.118.000,00	63.699.456.301,00	95,99
2018	79.016.175.000,00	77.448.439.098,00	98,02
2019	76.446.563.000,00	75.921.421.789,00	99,31
2020	68.784.539.000,00	65.520.750.972,00	95,26
2021	66.667.955.000,00	66.645.148.492,00	99,97
2022	73.801.484.000,00	73.660.635.345,00	99,81
2023	75.666.386.000,00	75,393,908,501,00	99,64

Sumber Data: OMSPAN

oleh sisa belanja pegawai yang lebih besar pada tahun 2023 yang terdiri dari sisa belanja Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Pegawai, yang disebabkan mutasi pegawai dan perhitungan hadir hari kerja

atas pengurangan hari penugasan. Sebagai perbandingan, kondisi realisasi anggaran Itjen dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 37. Realisasi Output Kegiatan Itjen KKP Tahun 2023**

No	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Realisasi	%
A.	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP			
KRO 1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	c. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	d. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	e. Layanan Audit Internal	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	f. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
B.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal			
KRO 2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	77 Unit	77 Unit	100%
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	77 Unit	77 Unit	100%
KRO 3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	6 Layanan	100%
	a. Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100%
	b. Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	100%
	c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
	d. Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%
	e. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%
	f. Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

No	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Realisasi	%
KRO 4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	400 Unit	400 Unit	100%
	Layanan Sarana Internal	400 Unit	400 Unit	100%
KRO 5	Layanan Manajemen SDM Internal	452 Orang	452 Orang	100%
	a. Layanan Manajemen SDM	226 Orang	226 Orang	100%
	b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	226 Orang	226 Orang	100%

## 2. Realisasi Anggaran Sasaran Program

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan tujuan Itjen selaku pengawas intern KKP pada tahun 2023 dilaksanakan melalui pencapaian 1 (satu) Sasaran Program yang diukur keberhasilannya dengan 19 indikator kinerja. Sebagai implementasi kinerja

berbasis anggaran, maka anggaran operasional Itjen dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya sasaran program dan tujuan. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Program Itjen tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 38. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Program Itjen KKP Tahun 2023**

Sasaran Program	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa	%
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	75.666.386.000	75,393,908,501	99,64%	272.477.499	0,36

Tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran kegiatan pengawasan dalam rangka mendorong pencapaian Sasaran Program “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP” mencapai Rp75.393.908.501,00 atau 99,64% dari alokasi Rp75.666.386.000,00. Realisasi anggaran tersebut secara umum digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk:

1. Mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Mendorong implementasi *Three Lines of Defense* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Mengawal percepatan pembangunan budaya integritas

dan penerapan program anti korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Mengawal implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Memastikan tindak lanjut rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Mengawal implementasi pelayanan publik di lingkungan



Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Mengawal efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas dan bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Mengawal percepatan reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
10. Meningkatkan kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### 3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Penilaian tingkat kualitas pelaksanaan anggaran tidak cukup dilihat dari tingkat realisasi keuangan saja, namun juga perlu dilihat dari seberapa besar nilai manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut. Dalam hal ini, Itjen KKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *Value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pada proses pengukuran, indikator efektivitas dalam *Value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisien lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur *Value for money* Itjen KKP antara lain:

1. Ekonomis: pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang

terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana Itjen KKP dapat meminimalisir sumber daya anggaran yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
3. Efisiensi: pencapaian *output* yang optimal dengan penggunaan sumber daya anggaran seminimal mungkin. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi *output* dengan *input* (anggaran) yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada kriteria di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Itjen telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Ekonomis

Pengelolaan anggaran Itjen telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Itjen yang dirumuskan untuk menjawab kebutuhan KKP, mitra kerja, dan internal Itjen. Dalam prosesnya, penyusunan anggaran Itjen juga telah melalui proses *reviu* yang dilaksanakan oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis.

Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan, Itjen menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Itjen diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM kualitas terbaik dengan biaya sekecil mungkin.

## 2. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2023, diketahui bahwa dari 19 IKU yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan program, seluruhnya dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Dengan capaian IKU tersebut, nilai rata-rata pencapaian sasaran dan terget kinerja Itjen tahun 2023 yang ditunjukkan dengan Skor Kinerja mencapai 111,26% atau diatas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran program pengawasan intern KKP terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan beserta tim pengelola kinerja Itjen.

## 3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengawasan Itjen tahun 2023 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi (Skor Kinerja). Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Itjen dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dinilai efisien karena dengan dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,64%) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (100%). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

### a. Efisiensi Capaian Kinerja Output

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,64% sedangkan capaian *output* dari masing-masing kegiatan mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,36% dalam menghasilkan *output* dengan optimal.

### b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Bila dibandingkan dengan Skor Kinerja sampai dengan Triwulan IV yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi tahun 2023, diketahui bahwa sumber daya anggaran Itjen digunakan secara efisien karena dengan



*input* anggaran yang lebih kecil (99,64%) dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (Skor Kinerja 111,26%). Dengan demikian, efisiensi

anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (Skor Kinerja) sebesar 11,22%.

**Tabel 39. Efisiensi Anggaran Itjen KKP Tahun 2023 per Jenis Capaian Kinerja**

Realisasi Anggaran (Input)		Realisasi Hasil		Efisiensi
99,64%	Output	100%		0,36%
Rp75.393.908.501,00	Kinerja Organisasi (Skor Kinerja)	111,26%		11,22%

Pencapaian efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas. Selain

itu, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis resiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran.



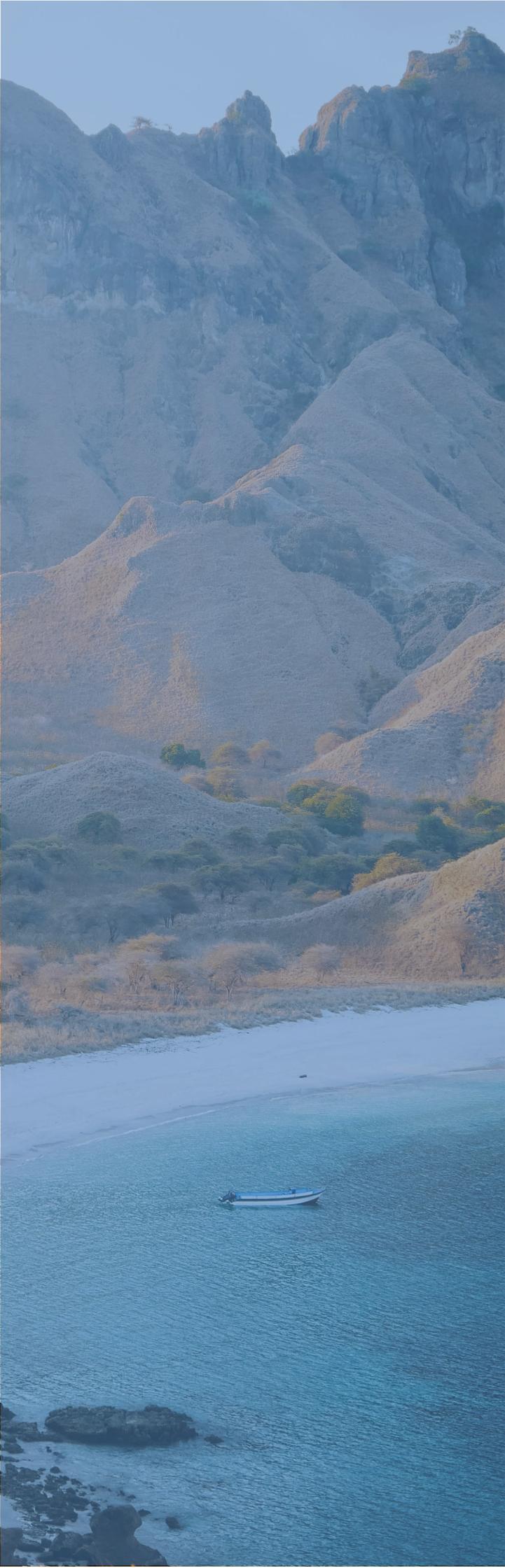




**BAB IV  
PENUTUP**



A. .Kesimpulan  
B. Permasalahan

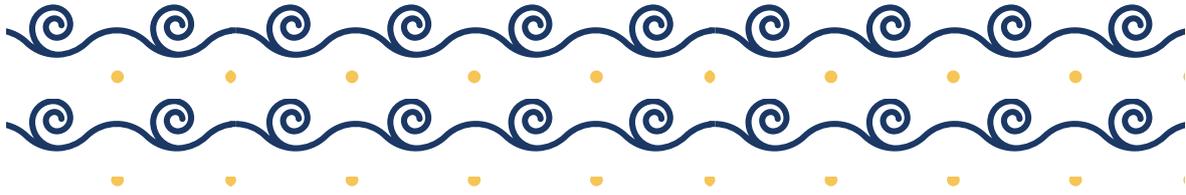


## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Itjen tahun 2023 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Itjen KKP tahun 2023 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi sampai dengan Triwulan IV yang mencapai 111,26% di mana Nilai Kinerja tersebut masuk ke dalam kategori Istimewa (>110%).
2. Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa seluruh IKU (19 IKU) yang menjadi ukuran pencapaian Sasaran Program Itjen dapat dicapai melebihi target yang telah ditetapkan (capaian >100%).
3. Beberapa capaian kinerja Itjen KKP yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja KKP antara lain:
  - a. Temuan materialitas oleh pengawas eksternal sebesar 0,12% dari total realisasi anggaran KKP atau jauh melebihi target yaitu  $\leq 1\%$  dari realisasi anggaran.



- b. Nilai Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) KKP mendapat Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,56.
  - c. Unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bertambah menjadi 97 Unit.
  - d. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja KKP mendapat nilai 83,18 atau predikat A (Memuaskan).
  - e. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP mencapai 91,52%.
4. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Itjen TA 2023 cukup baik yaitu mencapai Rp75.393.908.501,00 atau 99,64% dari alokasi anggaran setelah *Automatic Adjustment* sebesar Rp75.666.386.000,00. Bila realisasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Itjen yang mencapai 111,26% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Itjen cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit

dapat menghasikan capaian kinerja yang lebih tinggi.

## B. PERMASALAHAN

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian target kinerja Itjen Tahun 2023, hal ini ditunjukkan dengan tingkat realisasi seluruh indikator kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, untuk menjaga konsistensi dan kualitas kinerja selanjutnya, khususnya pada beberapa indikator kinerja yang capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, diperlukan penguatan pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan dalam hal:

1. Kualitas pengelolaan anggaran kegiatan dan data terkait pelaksanaan tugas/fungsi Itjen;
2. Penyusunan program kerja dan rencana kinerja pengawasan dengan menyesuaikan arah kebijakan baru;
3. Tindak lanjut hasil pengawasan internal;
4. Kepatuhan atas pemenuhan dan kualitas kendali mutu pengawasan;
5. Pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung manajemen



pengawasan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian layanan konsultasi bagi mitra.

### **C. RENCANA PERBAIKAN**

Terhadap beberapa hal yang memerlukan penguatan pengendalian dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana disampaikan di atas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, anggaran dan perkembangan capaian kinerja melalui pelibatan pengawas internal Itjen;
2. Melaksanakan Manajemen Risiko kegiatan lingkup Itjen dengan mengarahkan fokus pengendalian risiko kepada kegiatan-kegiatan yang menjadi proses kunci pencapaian tujuan Itjen;
3. Menyusun program kerja pengawasan Itjen dengan fokus pada pengawalan

program prioritas KKP dan kegiatan dengan tingkat risiko tinggi;

4. Menjadikan capaian kinerja Sekretariat Itjen Tahun 2023 sebagai acuan dalam perencanaan kinerja Tahun 2024
5. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal;
6. Mendorong pelaksanaan kendali mutu pengawasan melalui sistem informasi manajemen pengawasan (SIMWAS);
7. Percepatan pengembangan dan implementasi sistem informasi pendukung manajemen pengawasan melalui penyusunan desain tata kelola, rencana pengembangan dan melakukan reviu pedoman tata laksana pengawasan untuk mendorong penggunaan/pemanfaatan sistem informasi pendukung manajemen pengawasan.







**LAMPIRAN**



Lampiran 1  
Tabel Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2020 - 2024

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program	Dukungan Manajemen						80.100.000	85.500.000	91.600.000	98.000.000	104.600.000	459.800.000
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP dan Inspektorat Jenderal											
	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (level)	3	3	3	3	4						
	Tingkat Maturitas SPIP KKP (level)	3	3	3	3	3						
	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi) (unit kerja)	42	49	56	63	70						
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	30	31	32	33	34						
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP	72	73	74	75	76						
	Persentase Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Itjen KKP (%)	82	84	86	88	90						
	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	80	82	84	86	88						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP (nilai)	85	86	87	88	89						

Program	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Kinerja					Indikasi Pendanaan (Rp.000)					Total 2020-2024 (Rp.000)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pengawasan Intern KKP yang Handal												
	Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup KKP (%)	70	72,5	75	77,5	80							
	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	70	72,5	75	77,5	80							
	Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup KKP (%)	70	72,5	75	77,5	80							
	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	60	65	70	75	80							
	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18	18	18	18	18							
	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	85	86	87	88	89							
	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80	80	80	80	80							
	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (indeks)	4	4,05	4,1	4,15	4,2							



**Lampiran 2**  
Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tornanda Syaifullah  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono  
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, <sup>30</sup> November 2023

**Pihak Kedua**  
**Menteri Kelautan dan Perikanan**

Sakti Wahyu Trenggono

**Pihak Pertama**  
**Inspektur Jenderal**

Tornanda Syaifullah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
INSPEKTORAT JENDERAL**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤1
	2	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,1
	3	Nilai Evaluasi atas Maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,1
	4	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	90
	5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	80,5 (A)
	6	Nilai Integritas KKP (Nilai)	76
	7	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (Indeks)	83
	8	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
	9	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	85
	10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,75
	11	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP	86
	12	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%)	81
	13	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	81
	14	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	81
	15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	75
	16	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18
	17	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88
	18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80
	19	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,15



### Lampiran 3

#### Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun 2022

JENIS BANTUAN	JUMLAH*		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
<b>DJPT :</b>	40	39	79,82	8,08	7,18	88,08
Alat Penangkapan Ikan (API)						
Vessel Monitoring Aid (VMA)	18	18	80,00	7,50	0,00	87,50
Kapal	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Mesin Kapal	18	18	80,00	7,78	10,00	97,78
<b>TOTAL DJPT</b>	<b>77</b>	<b>76</b>	<b>76,32**</b>	<b>7,89**</b>	<b>6,18**</b>	<b>90,39**</b>
<b>DJPB :</b>	40	40	68,88	9,38	4,75	83,00
Mesin Pakan Ikan						
KJA	13	13	80,00	10,00	3,46	93,46
Bansarpras Budidaya Ikan (Bioflok)	59	55	54,82	9,73	5,73	70,27
Excavator	5	5	74,00	10,00	10,00	94,00
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	10	10	80,00	9,00	8,00	97,00
Kincir	10	10	78,00	10,00	5,50	93,50
<b>TOTAL DJPB</b>	<b>137</b>	<b>133</b>	<b>65,80**</b>	<b>9,62**</b>	<b>5,49**</b>	<b>80,91**</b>
<b>DJPDS :</b>	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Pasar Ikan Bersih						
Chest Freezer	34	34	77,94	9,47	7,35	94,76
Gudang Beku Portebel	2	2	80,00	10,00	10,00	100,00
Kendaraan Berpendingin	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Pabrik Es	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
<b>TOTAL DJPDS</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>78,16**</b>	<b>9,53**</b>	<b>7,63**</b>	<b>95,32**</b>
<b>DJPRL :</b>	2	2	80,00	10,00	10,00	100,00
Bantuan Konservasi (KOMPAK)						
Pengelolaan Sampah	2	2	72,50	10,00	10,00	92,50
Vegetasi Pantai	7	7	75,71	8,07	8,57	92,36
Wisata Bahari	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
<b>TOTAL DJPKRL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>76,25**</b>	<b>8,88**</b>	<b>9,17**</b>	<b>94,29**</b>
<b>BRSDMKP</b>	3730	263	72,89	8,79	9,03	90,71
Pelatihan Kepada Masyarakat						
<b>TOTAL BPPSDMKP</b>	<b>3730</b>	<b>263</b>	<b>72,89**</b>	<b>8,79**</b>	<b>9,03**</b>	<b>90,71**</b>
<b>TOTAL KKP</b>	<b>3995</b>	<b>523</b>	<b>72,07**</b>	<b>8,93**</b>	<b>7,63**</b>	<b>88,63**</b>

Keterangan:

PT: Pencapaian Tujuan

IG: Integrasi

AT: Adaptasi

\* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

\*\* Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan

#### Lampiran 4

Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM Lingkup KKP sampai dengan Tahun 2023

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK	Tahun WBK/WBBM MenPANRB
1	BBKIPM Jakarta I	BPPMHKP	2022	
2	BBKIPM Makassar	BPPMHKP		2019 Stranas Kawasan
3	BKIPM Ambon	BPPMHKP	2022	
4	BKIPM Balikpapan	BPPMHKP	2022	2023
5	BKIPM Banjarmasin	BPPMHKP	2021	
6	BKIPM Denpasar	BPPMHKP		2019 (WBK) Stranas; 2022 (WBBM)
7	BKIPM Entikong	BPPMHKP	2021	
8	BKIPM Jakarta II	BPPMHKP		2021
9	BKIPM Lampung	BPPMHKP	2023	
10	BKIPM Manado	BPPMHKP	2018	
11	BKIPM Mataram	BPPMHKP	2021	
12	BKIPM Medan I	BPPMHKP	2022	
13	BKIPM Medan II	BPPMHKP	2023	
14	BKIPM Merak	BPPMHKP	2023	
15	BKIPM Pangkalpinang	BPPMHKP	2023	
16	BKIPM Semarang	BPPMHKP		2014
17	BKIPM Surabaya I	BPPMHKP	2020	
18	BKIPM Surabaya II	BPPMHKP		2019 Stranas Kawasan
19	BKIPM Tarakan	BPPMHKP	2022	
20	BUSKIPM	BPPMHKP	2021	
21	SKIPM Batam	BPPMHKP	2022	
22	SKIPM Cirebon	BPPMHKP	2021	
23	SKIPM Pekanbaru	BPPMHKP	2021	
24	SKIPM Yogyakarta	BPPMHKP	2022	
1	SUPM Pontianak	BPPSDMKP	2017	
2	SUPM Waiheru	BPPSDMKP	2018	
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017	
4	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP	BPPSDMKP	2022	
5	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan	BPPSDMKP	2021	
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	BPPSDMKP	2017	
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	BPPSDMKP	2022	
8	Balai Riset Pemuliaan Ikan	BPPSDMKP	2021	
9	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017	



No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK	Tahun WBK/WBBM MenPANRB
10	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2019	
11	BPPP Ambon	BPPSDMKP	2023	
12	BPPP Banyuwangi	BPPSDMKP	2018	2021
13	Politeknik AUP Jakarta	BPPSDMKP	2022	
14	Politeknik KP Pangandaran	BPPSDMKP	2023	
15	Politeknik KP Sidoarjo	BPPSDMKP	2023	
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	DJPB		2014
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	DJPB	2020	
3	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	DJPB	2021	
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	DJPB	2022	
5	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	DJPB	2018	
6	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam	DJPB	2022	
7	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	DJPB	2017	
8	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	DJPB	2019	
9	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	DJPB	2022	
10	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	DJPB	2020	
11	BPBAP Jepara	DJPB	2018	2021
12	BPBAP Takalar	DJPB	2023	
13	BPBAP Ujung Batee	DJPB	2023	
1	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	DJPDS	2019	
2	Direktorat Logistik	DJPDS	2017	
3	Direktorat Pemasaran	DJPDS	2023	
4	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	DJPDS	2020	
5	Direktorat Usaha dan Investasi	DJPDS	2020	
1	BKKPN Kupang	DJPRL	2019	2022
2	BPSPL Denpasar	DJPRL	2018	
3	BPSPL Makassar	DJPRL	2017	
4	BPSPL Padang	DJPRL	2019	
5	BPSPL Pontianak	DJPRL	2017	2022

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK	Tahun WBK/WBBM MenPANRB
6	LKKPN Pekanbaru	DJPRL	2020	2022
7	LPSPL Sorong	DJPRL	2021	
8	LPSPLSerang	DJPRL	2020	
1	Pangkalan PSDKP Batam	DJPSPDKP	2020	
2	Pangkalan PSDKP Benoa	DJPSPDKP	2019	
3	Pangkalan PSDKP Bitung	DJPSPDKP	2018	
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	DJPSPDKP	2019	
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	DJPSPDKP	2021	
6	Pangkalan PSDKP Tual	DJPSPDKP	2020	
7	Stasiun PSDKP Ambon	DJPSPDKP	2023	
8	Stasiun PSDKP Belawan	DJPSPDKP	2021	
9	Stasiun PSDKP Biak	DJPSPDKP	2023	
10	Stasiun PSDKP Cilacap	DJPSPDKP	2021	
11	Stasiun PSDKP Kupang	DJPSPDKP	2022	
12	Stasiun PSDKP Pontianak	DJPSPDKP	2021	
13	Stasiun PSDKP Tahuna	DJPSPDKP	2022	
14	Stasiun PSDKP Tarakan	DJPSPDKP	2022	
1	Balai Besar Penangkapan Ikan	DJPT	2017	
2	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	DJPT		2016
3	PPN Brondong	DJPT	2019	
4	PPN Kejawan	DJPT	2020	
5	PPN Palabuhanratu	DJPT	2022	
6	PPN Pekalongan	DJPT	2020	
7	PPN Pemangkat	DJPT		2015
8	PPN Prigi	DJPT	2019	
9	PPN Sibolga	DJPT	2017	
10	PPN Sungailiat	DJPT	2019	
11	PPN Tanjung Pandan	DJPT	2023	
12	PPN Teluk Batang	DJPT	2023	
13	PPS Bitung	DJPT	2020	
14	PPS Cilacap	DJPT	2021	
15	PPS Kendari	DJPT	2021	
1	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	SETJEN	2022	
2	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	SETJEN	2020	
3	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SETJEN	2019	





**Kementerian Kelautan dan Perikanan**  
Inspektorat Jenderal